



## Dampak Kebijakan Moneter terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Maylia Farhan Hariadi<sup>1\*</sup>, Kayla Dwi Saputri<sup>2</sup>, Adelia Valentina<sup>3</sup>, Mellyana Candra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

[mfhariadi@student.umrah.ac.id](mailto:mfhariadi@student.umrah.ac.id)<sup>1\*</sup>, [kdsaputri@student.umrah.ac.id](mailto:kdsaputri@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>, [avalentina@student.umrah.ac.id](mailto:avalentina@student.umrah.ac.id)<sup>3</sup>,

[mellyana1001@gmail.com](mailto:mellyana1001@gmail.com)<sup>4</sup>

Korepondensi penulis: [mfhariadi@student.umrah.ac.id](mailto:mfhariadi@student.umrah.ac.id)

**Abstract:** This study aims to analyze the impact of monetary policy on income inequality in Indonesia over a certain period of time. Monetary policy implemented by Bank Indonesia plays an important role in maintaining macroeconomic stability through instruments such as interest rates, inflation, and the amount of money in circulation. However, the implementation of this policy also has an impact on the distribution of community income. This study uses a quantitative approach with secondary data in the form of time series analyzed using econometric regression methods to measure the effect of monetary policy variables on the income inequality index (Gini Ratio). The results of the study show that variables such as the benchmark interest rate and inflation have a significant relationship to income inequality. When inflation increases, the purchasing power of the lower middle class decreases more sharply than the upper class, thus widening the gap in inequality. Conversely, controlling inflation through appropriate interest rates can help reduce economic disparities. This study provides important meaning for policy makers to pay more attention to the distribution aspect in determining monetary policy so that economic growth can be more inclusive and equitable.

**Keywords:** Income Inequality, Inflation, Monetary Policy

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui instrumen seperti suku bunga, inflasi, dan jumlah uang yang beredar. Namun demikian, penerapan kebijakan ini juga berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa time series yang dianalisis melalui metode regresi ekonometrika untuk mengukur pengaruh variabel-variabel kebijakan moneter terhadap indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti tingkat suku bunga acuan dan inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menengah ke bawah menurun lebih tajam dibandingkan kelompok atas, sehingga memperlebar jurang ketimpangan. Sebaliknya, pengendalian inflasi melalui suku bunga yang tepat dapat membantu mereduksi disparitas ekonomi. Penelitian ini memberikan makna penting bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek distribusi dalam menetapkan kebijakan moneter agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Kebijakan Moneter

### 1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks negara berkembang, ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan distribusi kekayaan yang tidak merata, tetapi juga menjadi indikasi adanya hambatan struktural dalam sistem perekonomian yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti rendahnya mobilitas sosial, meningkatnya kriminalitas, serta menurunnya kualitas demokrasi akibat dominasi kelompok elit dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi (Hastuti et al., 2025). Oleh karena itu,

*Received: Juni 16, 2025; Revised: Juni 30, 2025; Accepted: Juli 12, 2025; Onlie Available: Juli 14, 2025*



memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan menjadi penting sebagai dasar dalam merancang kebijakan publik yang lebih inklusif. Salah satu aspek kebijakan makroekonomi yang diyakini turut berkontribusi terhadap ketimpangan adalah kebijakan moneter, yang dijalankan oleh otoritas moneter dalam rangka mengelola stabilitas nilai mata uang, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar di Masyarakat (Juhro, 2023).

Sebagai instrumen utama pengendalian ekonomi makro, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah perekonomian nasional. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang mandat untuk menjaga stabilitas moneter, khususnya melalui pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar (Britania et al., 2024). Dalam praktiknya, instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan (BI Rate atau BI-7 Day Reverse Repo Rate), operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum (GWM), dan intervensi nilai tukar menjadi alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, dalam jangka panjang, kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi, tetapi juga berdampak terhadap distribusi pendapatan di masyarakat. Misalnya, perubahan acuan suku bunga dapat berdampak berbeda terhadap kelompok masyarakat dengan akses berbeda terhadap pasar keuangan (Yulfiswandi & Jenny Yang, 2024). Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang memiliki aset finansial akan lebih diuntungkan dari kenaikan suku bunga, sementara kelompok berpendapatan rendah yang lebih bergantung pada konsumsi dan pinjaman justru terdampak negatif.

Hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan pendapatan merupakan isu yang kompleks dan sering kali bersifat ambigu. Di satu sisi, kebijakan moneter ekspansif seperti penurunan suku bunga dan peningkatan jumlah uang beredar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun di sisi lain, kebijakan yang sama juga berpotensi menciptakan inflasi yang lebih tinggi, yang biasanya lebih merugikan kelompok berpendapatan rendah karena daya beli mereka lebih rentan terhadap kenaikan harga barang dan jasa (Anwar, 2014). Selain itu, likuiditas yang tinggi di pasar keuangan juga cenderung menguntungkan investor besar dan pelaku usaha skala besar yang memiliki akses luas terhadap instrumen keuangan, sehingga memperlebar penurunan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa efek kebijakan moneter terhadap ketimpangan sangat bergantung pada konteks sosial-ekonomi, struktur sektor keuangan, serta efektivitas transmisi kebijakan di tingkat mikro.

Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah serius meskipun tingkat kemiskinan telah menurun secara bertahap dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Gini Ratio dari



Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sempat mengalami penurunan sejak tahun 2015, namun masih berada pada tingkat yang merefleksikan di beberapa daerah. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya bersifat antarkelompok, tetapi juga antarwilayah, yang menunjukkan adanya keutuhan pembangunan antara pusat dan daerah (Soleman & Noer, 2014). Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan reformasi fiskal. Namun demikian, perhatian terhadap dampak kebijakan moneter terhadap distribusi pendapatan masih tergolong terbatas dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Padahal, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kebijakan moneter, baik secara langsung maupun tidak langsung, memainkan peran penting dalam mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

Urgensi untuk mengkaji dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan semakin meningkat dalam konteks dinamika ekonomi global dan domestik yang tidak disebutkan, seperti krisis keuangan global, pandemi COVID-19, serta tekanan inflasi akibat terganggunya rantai pasok dan gejolak harga komoditas internasional. Dalam menghadapi berbagai krisis tersebut, Bank Indonesia cenderung menerapkan kebijakan moneter yang adaptif, misalnya dengan menurunkan suku bunga acuan secara signifikan pada masa pandemi untuk mendorong konsumsi dan investasi (Syahuri Zein et al., 2024). Meskipun langkah ini dinilai berhasil dalam menjaga stabilitas perekonomian secara umum, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan masih belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan moneter yang diterapkan selama periode krisis dan pemulihan ekonomi berdampak terhadap distribusi pendapatan masyarakat, baik secara langsung melalui akses terhadap pembiayaan maupun secara tidak langsung melalui pengaruh terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan pendapatan juga menjadi relevan dalam kerangka evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif. Selama ini, efektivitas kebijakan moneter cenderung diukur dari pencapaian target inflasi dan stabilitas nilai tukar, namun aspek distribusi sering kali terabaikan. Dalam era pembangunan yang mengedepankan keadilan sosial dan inklusivitas ekonomi, kebijakan makro seperti kebijakan moneter seharusnya tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek distribusi dan kesejahteraan (Utami et al., 2025). Oleh karena itu, Bank Indonesia dan pembuat kebijakan lainnya perlu mengembangkan pendekatan analisis kebijakan yang lebih holistik, termasuk mengintegrasikan indikator ketimpangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan moneter. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable



Development Goals), khususnya SDG nomor 10 yang tekanan pada pengurangan ketimpangan di dalam dan antarnegara.

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan pendapatan. Salah satunya adalah teori saluran transmisi moneter, yang menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui jalur suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi (Dara, 2023). Dalam konteks ketimpangan, saluran harga aset dan akses terhadap kredit menjadi sangat penting karena menunjukkan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari perubahan kebijakan tersebut. Kelompok masyarakat yang memiliki aset seperti saham, obligasi, atau properti akan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika nilai aset meningkat akibat pelonggaran moneter. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki aset dan menghadapi keterbatasan akses terhadap kredit akan lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.

Pendekatan ekonomi politik juga memberikan perspektif penting dalam menganalisis hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan. Pendekatan ini menyoroti bagaimana kebijakan moneter sering kali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok elit ekonomi dan finansial yang memiliki pengaruh besar dalam proses penyusunan kebijakan (Yunus & Ardiansyah, 2024). Dalam beberapa kasus, kebijakan moneter yang tampak netral secara makro sebenarnya memiliki diberlakukannya distribusi yang signifikan karena memperkuat posisi ekonomi kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan juga perlu memperhatikan dimensi politik dan institusional dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Di Indonesia, peran independensi Bank Indonesia dan koordinasinya dengan pemerintah menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Penelitian tentang dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia masih relatif terbatas dan diteliti dalam berbagai pendekatan metodologi. Beberapa penelitian menggunakan model ekonometrika dengan data time series maupun panel untuk mengidentifikasi hubungan antara suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks ketimpangan seperti Gini Ratio. Hasilnya pun beragam, tergantung pada periode analisis, variabel kontrol yang digunakan, serta pendekatan statistik yang diambil. Namun secara umum ditemukan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi ketimpangan baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun kekuatan pengaruhnya berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi makro saat itu. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk memperkaya literatur yang ada dengan memberikan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan berbasis data terbaru guna memberikan masukan yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan.



## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, persepsi, dan perilaku subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berupaya memahami bagaimana kebijakan moneter di Indonesia berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka statistik, tetapi berupa informasi kualitatif yang kaya akan deskripsi dan interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi pustaka. Artinya, data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Peneliti akan melakukan penelusuran, membaca, dan menganalisis literatur tersebut untuk mengidentifikasi berbagai perspektif, temuan, dan argumentasi terkait dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, menggambarkan temuan-temuan dari literatur yang telah dikaji.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir, distribusi pendapatan yang tidak merata tetap menjadi masalah serius. Ketimpangan ini tercermin dalam indeks Gini yang menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan nasional masih diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, sementara sebagian besar lainnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, salah satunya adalah kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter.

Kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter. Instrumen utama yang digunakan meliputi penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif, dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, atau kontraktif, dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun dampak kebijakan moneter tidak hanya



terbatas pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

Salah satu saluran utama melalui mana kebijakan moneter yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah melalui perubahan suku bunga. Kenaikan suku bunga cenderung menguntungkan pemilik aset keuangan karena mereka mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari simpanan mereka. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang bergantung pada pinjaman untuk konsumsi atau investasi akan menghadapi beban bunga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi daya beli mereka. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat meringankan beban bunga bagi peminjam dan mendorong konsumsi serta investasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan pendapatan kelompok pengangguran rendah dan mengurangi ketimpangan.

Kebijakan moneter juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui saluran inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat, terutama kelompok yang keberadaannya tetap atau rendah yang tidak memiliki aset lindung nilai terhadap inflasi. Kebijakan moneter yang efektif dalam mengendalikan inflasi dapat membantu menjaga daya beli kelompok ini dan mencegah peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun, jika kebijakan moneter terlalu ketat dalam mengendalikan inflasi, hal ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pendapatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Struktur ekonomi yang beragam antar daerah juga mempengaruhi bagaimana kebijakan moneter berdampak pada ketimpangan pendapatan. Daerah dengan akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dan infrastruktur cenderung lebih mampu memanfaatkan kebijakan moneter ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, daerah yang kurang berkembang tidak merasakan manfaat yang sama, sehingga ketimpangan antar daerah dapat meningkat. Oleh karena itu, penting bagi otoritas moneter untuk mempertimbangkan perbedaan daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan moneter.

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Studi yang menggunakan model ekonometrika menemukan bahwa kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan suku bunga, dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan menekan aktivitas ekonomi dan



meningkatkan penurunan. Namun, efek ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi makro dan struktur pasar tenaga kerja.

Kebijakan moneter syariah juga menjadi perhatian dalam konteks ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kebijakan moneter syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam, dapat memberikan alternatif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak dilayani oleh sistem keuangan konvensional. Namun, efektivitas kebijakan moneter syariah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam merancang kebijakan moneter yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, penting bagi otoritas moneter untuk mempertimbangkan berbagai saluran transmisi kebijakan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Hal ini termasuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap suku bunga, inflasi, akses keuangan, dan distribusi pendapatan antar daerah. Selain itu, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga penting untuk mencapai tujuan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan fiskal, seperti subsidi, transfer tunai, dan program perlindungan sosial, dapat melengkapi kebijakan moneter dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kebijakan moneter di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui peningkatan lapangan kerja, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan inflasi yang merugikan kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat menekan inflasi tetapi juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan. Efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi ketimpangan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi, akses terhadap layanan keuangan, dan efektivitas transmisi kebijakan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam dampak kebijakan moneter, khususnya dalam konteks krisis ekonomi dan perkembangan ekonomi global terkini, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peran koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal juga krusial untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.



## REFERENSI

- Anwar, K. (2014). Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 6(2).
- Britania, Y., Septiani, D., Ghibran, M. H., & Siregar, P. A. (2024). Peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga dan menciptakan stabilitas perekonomian Indonesia menurut perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 22(3).
- Dara, R. R. (2023). Dampak transmisi kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 78–96.
- Hastuti, D., Judijanto, L., Mangaluk, E., Sepriano, S., & Parmadi, P. (2025). *Sosial politik: Konsep dan teori*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juhro, S. M. (2023). *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Soleman, M., & Noer, M. (2014). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 13, 1961–1975. <http://nasional.kompas.com>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan research dan development*. Alfabeta.
- Syahuri Zein, A., Hasibuan, W. P. E. S., Saripah, A., Hasibuan, I. H., Salwa, L., & Addary, U. S. A. H. A. (2024). Analisis kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *KINDAI*, 20(3), 247–259.
- Utami, N. F., Aristianti, D. A., Kholil, A., Ardifta, S. S., & Hayati, S. (2025). Perbedaan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dan perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(5), 1063–1073.
- Yulfiswandi, & Yang, J. (2024). Pengaruh makroekonomi terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013–2022: Dimoderasi oleh socio-political index. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 451–464. <https://doi.org/10.36985/fzn75g72>
- Yunus, A. M. A., & Ardiansyah, M. (2024). *Ekonomi politik*. Penerbit K-Media.